

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

##### 5.1.1. Landasan dan Konstruksi Pemikiran Politik Kyai Di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng

Landasan dan konstruksi pemikiran KH. Shalahudin Wahid, KH Abdul Manab dan KH Ahsin Ashari berasal dari sumber pemikiran politik yang sama yakni dari Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijtihad para ulama salaf yang tertuang di dalam kitab-kitab kuning, walaupun persepsi mereka kadang tidak sama. Persepsi yang berbeda tersebut mengakibatkan orientasi pemikiran politik ketiga tokoh tersebut di lapangan berbeda. KH Salahuddin Wahid lebih berorientasi kepada politik *wisdom* untuk kebaikan bangsa dengan berbagai macam pemikiran yang kritis-analitis-reflektif dan dialektif. Sedangkan KH Abdul Manab lebih berorientasi kepada politik pragmatis terutama untuk kepentingan pendidikan. Adapun KH Ahsin Ashari, lebih berorientasi kepada sisi pendidikan moral dan etika politik untuk para santri di pesantrennya. Menurut ketiga Kyai tersebut, kegiatan politik adalah dinilai ibadah karena melaksanakan salah satu bagian *inhern* dari ajaran Islam kaffah sehingga aktivitas politik merupakan ibadah, untuk itu maka perlu dilandasi oleh niat yang ikhlas.

##### 5.1.2. Pemikiran Politik Kyai Di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

KH Salahuddin Wahid, corak pemikiran politiknya lebih bersifat teoritis dalam hal-hal kepartaian, sehingga dia tidak pernah terlibat dalam kepemimpinan atau keanggotaan sebuah partai politik, tetapi lebih bersifat praktis dalam membela hak-hak asasi manusia. Corak perjuangan politiknya bukan memperjuangkan politik kekuasaan atau memperjuangkan kepentingan sektoral, tetapi ia lebih sebagai pejuang kemanusiaan, kerakyatan, dan kebangsaan. Oleh karena itu, corak pemikiran KH Salahuddin Wahid banyak menjadi rujukan orang-

orang partai politik, baik partai politik bersimbol Islam maupun partai politik nasionalis murni.

Berbeda dengan KH Solahudin Wahid, KH Abdul Manab merupakan seorang akademisi atau dosen di perguruan tinggi Islam negeri sekaligus pengasuh Pondok Modern Darul Hikmah. Corak pemikiran politik KH Abdul Manab cenderung pragmatik, dalam arti mencari kebermanfaatan politik secara langsung dan tidak menyentuh pada wilayah sisi idealisme politik. Ia selalu mengarahkan politik praktisnya kepada kepentingan pendidikan Islam yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun KH Ahsin Anshari sebagai non politisi dan non akademisi memiliki visi politik yang cukup dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Ia dikenal sebagai kyai yang mengajarkan tahfiz Al Quran dan telah banyak melahirkan hafiz/hafizah. Pemikiran politik KH Ahsin Anshari berada pada tataran moral politik yang ditransformasikan melalui sistem pendidikan pondok pesantren salafi. Dalam tradisi salafi, guru memegang peranan penting dalam pendidikan dan transformasi nilai termasuk nilai-nilai politik dan cara-cara mewujudkan *good citizen* yang bersumber dari tafsir Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama salaf yang ditulis pada kitab-kitab kuning.

### **5.1.3. Implikasi Konstruksi Pemikiran Politik Kyai Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan Santri**

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan semua pondok pesantren telah berperan dalam membangun jiwa warga negara Indonesia yang cinta kepada tanah air dan bangsa. Pondok pesantren Putera Menara Al Fattah sebagai pondok pesantren salaf tidak secara eksplisit mengajarkan politik namun dasar-dasar berpolitik yaitu moral politik melalui pembangunan jiwa warga negara senantiasa dilakukan sepanjang hari melalui sistem pendidikan salafi. Kurikulum pendidikan salafi yang menuntut penerapan setiap ilmu pengetahuan yang telah didapat melalui pengajian berdampak kepada transformasi ajaran Islam menjadi kebajikan warga negara.

Sedangkan dalam Pondok Modern Darul Hikmah pendidikan politik senantiasa dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan

kewarganegaraan yang secara wajib ada pada program pendidikan formal di pondok pesantren tersebut. Pondok Modern Darul Hikmah menerapkan kurikulum pendidikan nasional, kurikulum kementerian agama serta kurikulum Pondok Modern Gontor sebagai dasar kurikulum pendidikan. Perbedaan mendasar dengan kurikulum pondok pesantren salaf adalah pada penekanan penerapan ilmu pengetahuan dalam membangun jiwa warga negara melalui pembiasaan dan keteladanan atas ilmu pengetahuan yang diperoleh atas dasar spiritualitas. Di Pondok Modern pembiasaan dan keteladanan tersebut kehilangan jati diri spiritualitas ajaran agama Islam, sehingga pembentukan moral dan karakter tidak sampai kepada pembangunan jiwa warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik disampaikan secara formal dalam media pembelajaran sekolah yang menekankan teoritis.

Perpaduan antara sistem pondok pesantren salaf dan sistem pendidikan modern terdapat di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang menerapkan kurikulum pendidikan formal, kurikulum kemenag, kurikulum *cambridge* dan kurikulum pondok pesantren salaf sebagai marwah atau dasar dari pelaksanaan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, pembiasaan kebajikan warga negara oleh santri, keteladanan kebajikan yang diberikan oleh pengurus dan pengasuh pondok serta materi pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di sekolah memperkuat pendidikan politik warga negara.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa dalil dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Konstruksi pemikiran politik setiap individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan karakteristik individu tersebut.
2. Pendidikan pondok pesantren salaf membentuk moral dan karakter santri sesuai dengan ajaran Islam yang dapat mewujudkan *good citizen*.
3. Sumber norma (*norms*) dan nilai (*values*) moral dan etika politik dalam tradisi pesantren salafi adalah Al-Quran, sunah Rasul, hasil ijtihad para ulama terdahulu yang tertuang di dalam kitab-kitab kuning.
4. Kyai sebagai tokoh agama adalah tokoh masyarakat yang menjadi fokus keteladanan.
5. Perbedaan pemikiran politik adalah sesuatu yang wajar.

6. Pendidikan politik yang paling baik adalah keteladanan, baik dalam pemikiran maupun tindakan politik.
7. Kyai yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan religius dengan ketinggian spiritualitas beragama dapat menjadi insan yang bijaksana.

## 5.2. Implikasi

Konstruksi pemikiran politik kyai, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pendidikan politik di pondok pesantren yang diasuhnya. Indikator pengaruh tersebut dapat dilacak melalui penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren serta keteladanannya. Konstruksi pemikiran politik kyai sebaiknya diorientasikan kepada pemikiran moral dan etika politik. Tujuannya agar peran kyai mampu menerangi masyarakat, dengan misi untuk mendidik santri tentang moral politik dan perwujudan *good citizen*. Sebaliknya apabila para kyai lebih berorientasi kepada politik praktis yang sering berubah-ubah “kiblat”, sangat mungkin kyai akan kehilangan konsistensinya. Hal itu bisa menggerus harga diri dan *muruah* kyai.

Pendidikan politik dimaknai sebagai sosialisasi politik (*political socialization*). Kontennya adalah pembumian program-program pemerintah dalam bidang politik, terutama dalam mewujudkan *good citizen*. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan politik adalah pendidikan moral dan karakter bangsa yang baik sebagai modal dasar dalam berpolitik. Untuk itu moral menjadi instrumen utama dalam politik dan pendidikan politik.

Pembangunan jiwa warga negara yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Islam harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam proses pendidikan di pondok pesantren. Dalam hal ini pondok pesantren salaf seperti Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah dan Tebu Ireng telah berperan dalam pendidikan politik sebelum kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn juga merupakan instrumen penting mengingat mata pelajaran tersebut merupakan bagian dan upaya dari pendidikan politik di lembaga pendidikan formal (sekolah).

### 5.3. Rekomendasi

Di dalam kitab *Ta'lim Muta'alim* terdapat konsep-konsep pendidikan yang sangat mendasar, yang belum diimplementasikan dalam pendidikan formal, seperti konsep *barakah*, *ta'dzim*, *tawadhu'* dan seterusnya, yang mencerminkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan "nur" atau cahaya. Karena sifat ilmu seperti itu, maka untuk memperolehnya harus melalui proses yang baik dan benar dengan jalan mendekati diri kepada Allah SWT, menghormati guru dan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Konsep *barakah*, *ta'dzim*, *tawadhu'* dan seterusnya, perlu diimplementasikan di semua jenis lembaga pendidikan, jalur dan level, harapannya adalah ilmu apapun yang diperoleh anak didik dapat bermanfaat bukan hanya di dunia namun juga mendapat pahala diakhirat. Insya Allah akan lahir lulusan yang bijaksana.